



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 23 Januari 2026



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	11
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	17
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	24
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/Peningkatan dan Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	27
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran Strategis.....	29
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	36
BAB IV PENUTUP	41
4.1. Kesimpulan	41
4.2. Perbaikan Kedepan	41
LAMPIRAN.....	43
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
2. Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2025	
3. Data Rekapitulasi Kejadian Bencana Perkecamatan Tahun 2025	
4. Data Rekapitulasi Kejadian Per Jenis Bencana Perkecamatan Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
Tabel 3. Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
Tabel 4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	18
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun ini dengan Target Renstra	25
Tabel 7. Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/Peningkatan dan Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	27
Tabel 8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 9. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran Strategis	33
Tabel 10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	37
Tabel 11. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan :

1. BPBD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
2. BPBD sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Demikian juga pada Pasal 3, yang menyebutkan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. BPBD mempunyai tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
2. BPBD mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
 - b. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
 - d. Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan.

Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara profesional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampaknya adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala dalam operasional organisasi dan penanganan kebakaran dan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang.

Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
 - a) Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif kependekatan preventif.
 - b) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan pada hal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana
 - c) Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
 - a) Belum ada dan optimalnya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : Pusdalops, TRC, Tim Jitu Pasma, dll
 - b) Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari Satlak PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kembali lagi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- c. Dalam aspek Ketugasan:
- a) Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 - b) Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
 - c) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
 - d) Masih minimnya jumlah relawan siaga bencana.
 - e) Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
 - f) Belum ada dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
 - g) Laporan data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar ,sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tabel.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN POKOK(Eselon II)	PERMASALAHAN (Eselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
1. Pelayanan Informasi ,Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana belum optimal	1. Pelayanan Informasi Rawan bencana belum optimal.	1. Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang
		2. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi.
		3. Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana
	2. Pelaksanaan Pencegahan dan kesiapsiagaan masih rendah	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
		2. Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS).

PERMASALAHAN POKOK(Eselon II)	PERMASALAHAN (Eselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
		3. Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 4. Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon) 5. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
2. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	3. Pelaksanaan Penanganan Bencana , Penyelamatan dan Evakuasi Korban belum optimal	1. Keterbatasan jumlah Aparat Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 2. Keterbatasan Sertifikasi keahlian petugas penyelamatan dan evakuasi korban bencana 3. Keterbatasan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Belum terbentuknya Tim Reaksi Bencana (TRC) Kabupaten.
3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	1. Pelaksanaan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum maksimal 1. Belum adanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah	1. Keterbatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2. Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah 3. Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat. 1. Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah. 2. Belum terjalinnya kemitraan antar stakeholder dalam penanggulangan pasca bencana 3. Belum tersedianya Data Induk Kebencanaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

Tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP	Tingkat	79
2	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Persen	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	73

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi rawan Bencana	Persen	18,11
5	Optimalnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	19,55
6	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100
7	Optimalnya Penataan Sistem Dasara Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2
8	Meningkatnya kualitas pencegahan dan Pengendalian Bencana	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	19,25
9	Meningkatnya Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban membahayakan manusia	Cakupan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Persen	100
10	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan dan pelaporan dan tindaklanjut hasil forum konsultasi publik (FKP)	Persen	100
11	Menyelesaikan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindaklanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
12	Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Intern	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3,7 (Tinggi)
13	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
14	Tindaklanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindaklanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
16	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
19	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih melayani	Nilai RB Kabupaten	Nilai	65
20	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
21	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai SPM	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a) Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b) Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rata-rata realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebesar 69%, maka merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yaitu 66% ≤ 75%. termasuk dalam kategori peringkat kinerja SEDANG.

Kategori B dengan nilai absolut 60-70 memiliki interpretasi Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen. dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja BPBD tahun 2025 telah dilakukan Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel. 4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	72,28	91%	91%	10%	82%
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	73,00	89,79	123%	110%	10%	99%
4	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	18,11	6,15	34%	34%	10%	31%
5	Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19,55	9,95	51%	51%	10%	46%
6	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	75,00	75%	75%	10%	68%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
7	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	2,00	10,00	500%	110%	10%	99%
8	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19,25	9,95	52%	52%	10%	47%
9	Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	90,00	90%	90%	10%	81%
10	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100,00	0,00	0%	0%	10%	0%
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%
12	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	3,00	3,83	128%	110%	10%	99%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
13	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1,00	0,00	0%	0%	10%	0%
14	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100,00	100%	100%	10%	90%
16	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48,00	48,00	100%	100%	10%	90%
17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3,70	3,26	88%	88%	10%	79%
18	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	77,00	65,92	86%	86%	10%	77%
19	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	65	71,51	110%	110%	10%	99%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
20	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	100	48,09	48%	48%	10%	43%
21	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	100	66,13	66%	66%	10%	59%
Total Capaian PK (4)								1459%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								69%
Predikat PKO (6)								BUTUH PERBAIKAN

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 69%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar 94%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 24%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025						TAHUN 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	72,28	91%	91%	10%	82%	78	64,62	83%	
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%	100	100	100%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	73,00	89,79	123%	110%	10%	99%	70	98,17	140%	
Optimalnya Pelayanan	Persentase Layanan	18,11	6,15	34%	34%	10%	31%	15,11	15,11	100%	

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025						TAHUN 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Target	Realisasi	Capaian	
Informasi Rawan Bencana	Informasi Rawan Bencana										
Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19,55	9,95	51%	51%	10%	46%	16,55	16,55	100%	
Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	75,00	75%	75%	10%	68%	100	100	100%	
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	2,00	10,00	500%	110%	10%	99%	2	2	100%	
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan	Persentase Layanan Pencegahan dan	19,25	9,95	52%	52%	10%	47%	16,55	16,55	100%	

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025						TAHUN 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Target	Realisasi	Capaian	
Pengendalian Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	90,00	90%	90%	10%	81%	100	100	100%	
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100,00	0,00	0%	0%	10%	0%				
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%	100	89,17	89%	

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025						TAHUN 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Target	Realisasi	Capaian	
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	3,00	3,83	128%	110%	10%	99%				
Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1,00	0,00	0%	0%	10%	0%	3	3	100%	
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%	1	0	0%	
Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100,00	100%	100%	10%	90%				
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48,00	48,00	100%	100%	10%	90%				

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025						TAHUN 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3,70	3,26	88%	88%	10%	79%				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	77,00	65,92	86%	86%	10%	77%				
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	65	71,51	110%	110%	10%	99%	77	65,92	86%	
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	100	48,09	48%	48%	10%	43%	65	71,51	110%	
Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara	Capaian Indeks Penerapan SPM	100	66,13	66%	66%	10%	59%	100	100	100%	

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025						TAHUN 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Target	Realisasi	Capaian	
sesuai Standar Pelayanan Minimal											
		Total Capaian PK (4)					1459%			1408%	
		Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)					69%			94%	

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 6**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2025)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Nilai SAKIP	79	72,28	91%
Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100	100	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73	89,79	123%
Persentase Layanan Informasi rawan Bencana	18	6,15	34%
Persentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	20	9,95	51%
Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	75	75%
Jumlah Regulasi Daerah	2	10	500%
Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	19	9,95	52%
Cakupan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	100	90,00	90%
Persentase Pelaksanaan dan pelaporan dan tindaklanjut hasil forum konsultasi publik (FKP)	100	0	0%

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2025)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Tindaklanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100	100	100%
Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	3	3,83	128%
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	0	0%
Tindaklanjut Pengaduan SP4N Laporan	100	100	100%
Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100	100%
Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48	48	100%
Nilai LPPD	4	3,26	88%
Nilai SAKIP Kabupaten	77	65,92	86%
Nilai RB Kabupaten	65	71,51	110%
Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	100	48,09	48%
Capaian Indeks Penerapan SPM	100	66,13	66%

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/peningkatan dan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel .7

Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/peningkatan dan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab			Solusi
Keberhasilan	Kegagalan	Penurunan Kinerja	
1	2	3	4
Akses informasi publik meningkat. Masyarakat lebih mudah memantau kinerja BPBD, Penggunaan anggaran lebih terarah, Prioritas pada program yang efektif dan lebih terkoordinasi.	Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang SAKIP serta Evaluasi kinerja yang tidak rutin. Tidak ada tindak lanjut	Pengumpulan data yang kurang teliti. Laporan kinerja tidak valid serta Kegagalan SAKIP berdampak signifikan pada efektivitas BPBD. Respons lambat, anggaran boros, kurang koordinasi.	Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan SAKIP, Pastikan data akurat dan terpercaya serta Lakukan evaluasi kinerja secara berkala
Ketersediaan anggaran dan peralatan yang cukup mendukung kinerja. Ini memastikan penanganan yang optimal, serta lebih terkoordinasi. Respons cepat saat bencana	Anggaran yang tidak mencukupi menghambat program penanggulangan bencana. Ini memengaruhi efektivitas respons.	Keterbatasan anggaran, peralatan, dan personel, Alokasi anggaran tidak sesuai kebutuhan	Alokasikan anggaran yang mencukupi sesuai kebutuhan
Kerja sama yang baik antar instansi mempercepat respons terhadap bencana	Koordinasi yang buruk antar instansi memperlambat penanganan. Ini menyebabkan respons yang kurang efektif	Informasi tidak tersampaikan dengan baik. Kurangnya forum diskusi dan evaluasi	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung respon bencana
Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	SDM yang kurang terlatih memengaruhi kualitas penanganan bencana. Pelatihan yang memadai sangat dibutuhkan	Personel kurang terlatih dalam penanganan bencana. Kurangnya simulasi dan uji coba	Pelatihan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel. Ini meningkatkan respons terhadap bencana
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur	Masyarakat kurang memahami pentingnya mitigasi bencana dan kurang terlibat dalam upaya pencegahan.	Proses pengambilan keputusan lambat dan birokrasi berbelit	Membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah
	Infrastruktur yang terbatas untuk akses dan transportasi dalam penanganan bencana	Koordinasi antar bidang dan instansi terkait kurang efektif	

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel .8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	86	(3,99)
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	31	Program Penanggulangan Bencana	70	(38,96)
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	46	Program Penanggulangan Bencana	64	(18,16)
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	68	Program Penanggulangan Bencana	68	(0)
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	99	Program Penanggulangan Bencana	84	15

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program setelah dilakukan koreksi penilaian organisasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program tahun 2025 yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinth (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar 79 dan realisasinya 72,28 atau capaian kinerja sebesar 82%, target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang SAKIP;
- 2) Evaluasi kinerja yang tidak rutin;
- 3) Pengumpulan data yang kurang teliti;
- 4) Laporan kinerja tidak valid ;dan
- 5) Tidak ada tindak lanjut.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan SAKIP;
- 2) Pastikan data akurat dan terpercaya;dan
- 3) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.

- 2) Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja Program tahun 2025 , yaitu :

1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dengan target sebesar 18,11% dan realisasinya 6,5% atau capaian kinerja sebesar 31%. Target kinerja belum tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang ;
- 2) Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi dan :
- 3) Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Meningkatkan Sosialisasi Informasi rawan bencana ;

- 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi :
 - 3) Peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana dan ;
 - 4) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
2. Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target kinerja sebesar 19,55% dan realisasinya 9,95% atau capaian kinerja sebesar 46%, Target kinerja belum tercapai.
- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
 - 2) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)
 - 3) Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
 - 4) Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon)
 - 5) Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten.
 - b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ;
 - 2) Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) ;
 - 3) Penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya ;
 - 4) Menyusun Dokumen Kontinjensi (Renkon) dan ;
 - 5) Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten.
3. Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasinya 75% atau capaian kinerja sebesar 68% target kinerja belum tercapai.
- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Belum optimalnya pelaksanaan dalam penentuan status tanggap darurat

- 2) Belum optimalnya penerapan sistem komando operasi darurat
 - 3) Masih rendahnya kapasitas petugas tim kaji cepat
 - 4) Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luasnya wilayah
 - 5) Terbatasnya kapasitas petugas pencarian dan penyelamatan
 - 6) Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari tingkat RT, desa/kelurahan, bahkan kecamatan memberikan laporan kejadian bencana.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Peningkatan kapasitas petugas ;
 - 2) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
 - 3) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 4) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
 - 5) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
 - 6) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.
4. Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah dengan target kinerja sejumlah 2 dan realisasinya 2 atau capaian kinerja sebesar 99%, Target Kinerja tercapai.
- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
- 1) Ketebatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
 - 2) Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi didaerah ;
 - 3) Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat dan :
 - 4) Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Meningkatkan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
- 2) Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
- 3) Mempercepat pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah dan :
- 4) Menyusun penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah.

Tabel. 9
Analisis Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	6
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	79	72,28	91	1. Penetapan Target: Target kinerja yang ditetapkan terlalu mudah dicapai atau, sebaliknya, tidak realistis dan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai (Keterbatasan Anggaran). 2. Dokumen Perjanjian Kinerja: Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antar-unit kerja belum disusun secara rinci dan terintegrasi, membuat akuntabilitas menjadi bias.* Data Kinerja Belum Terukur: Pengukuran kinerja belum dilakukan secara periodik (bulanan/triwulanan) atau masih bersifat seremonial, tanpa analisis mendalam. * Ketidaktepatan Indikator: Penggunaan indikator yang terlalu berorientasi pada output (misalnya, jumlah sosialisasi) daripada outcome (misalnya, peningkatan Indeks Ketahanan Daerah/IKD atau penurunan risiko). * Kurangnya Penggunaan IT: Pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum didukung oleh aplikasi sederhana untuk membandingkan target vs. realisasi secara real-time.

Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	6
Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	18,11	6,15	34	<p>1. Keterbatasan SDM: Jumlah aparatur dan relawan yang bertugas dalam sosialisasi minim. 2. Kapasitas Tidak Merata: Kualitas penyampaian informasi antartetugas berbeda-beda. 3.EWS Minim: Sistem Peringatan Dini (EWS) belum komprehensif untuk semua jenis ancaman bencana. 4.Papan Informasi Kurang: Rambu dan papan informasi rawan bencana belum terpasang merata di semua lokasi risiko tinggi. 5. Sosialisasi Tidak Tepat Sasaran: Program sosialisasi belum fokus pada kelompok masyarakat paling rentan. 6. Tidak Ada Standarisasi: Format dan konten penyebaran informasi berbeda-beda, menyebabkan pesan yang diterima masyarakat tidak seragam atau kurang efektif.</p>
Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	19,55	9,95	51	<p>1. Rendahnya Jumlah Partisipan Pelatihan: Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (seperti simulasi evakuasi, pertolongan pertama, atau manajemen logistik bencana) masih rendah. Layanan pencegahan harus menghasilkan peningkatan kemampuan, bukan hanya penyampaian informasi.</p> <p>2.Belum Optimalnya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana): Belum semua desa/kelurahan yang memiliki risiko tinggi telah dibentuk atau difasilitasi menjadi Destana yang aktif dan berkelanjutan. Destana adalah indikator kunci kesiapsiagaan masyarakat di tingkat tapak.</p> <p>3.Kurangnya Sinergi Lintas Sektor: Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain (misalnya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, atau Dinas PU) untuk memastikan sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur aman bencana.</p>

Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	6
Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	100	75	75	Tidak ada korban jiwa, terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan berkurangnya kerusakan infrastruktur
Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Program Penanggulangan Bencana	2	2	100	Membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah, dan tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **83,35%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .10

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.520.800,00	593.262.361,00	96,07	24.258.439,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.097.374.770,00	8.724.428.270,00	86,40	1.372.946.500,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.650.000,00	114.723.850,00	87,14	16.926.150,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.315.800,00	605.423.970,00	94,26	36.891.830,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965.446.817,00	432.923.793,00	44,84	532.523.024,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.507.335.010,00	1.320.904.079,00	87,63	186.430.931,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000.000,00	1.934.352.318,00	96,72	65.647.682,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	361.212.400,00	252.716.180,00	69,96	108.496.220,00
Meningkatkan Pelayanan dan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.070.602.000,00	686.946.802,00	64,16	383.655.198,00
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.119.335.600,00	762.459.177,00	68,12	356.876.423,00
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	468.244.600,00	392.768.974,00	83,88	75.475.626,00
Total			18.981.037.797,00	15.820.909.774,00	83,35	3.160.128.023,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar 87,52%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel.11
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2024)

	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000,00	690.778.663,00	92,1	59.221.337,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.660.143.329,00	7.675.953.872,00	79,46	1.984.189.457,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000.000,00	220.990.080,00	98,22	4.009.920,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	975.000.000,00	774.924.909,00	79,48	200.075.091,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.160.500.000,00	1.043.174.028,00	89,89	117.325.972,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.846.265.214,00	19.490.515.953,00	98,21	355.749.261,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.088.185.623,00	1.252.757.342,00	59,99	835.428.281,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.993.888.570,00	2.968.790.896,00	99,16	25.097.674,00

	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	255.248.000,00	160.775.820,00	82%	94.472.180,00
Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.382.860.000,00	1.698.466.322,00	75%	684.393.678,00
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.148.828.560,00	3.102.942.257,00	85%	1.045.886.303,00
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	875.000.000,00	619.968.073,00	40%	255.031.927,00
Total			45.360.919.296,00	39.700.038.215,00	87,52	5.660.881.081,00

Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar **4,17%**

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 setelah koreksi penilaian organisasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, kinerja rata-rata sebesar 69% , maka merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yaitu $66\% \leq 75\%$. termasuk dalam kategori peringkat kinerja SEDANG.

Dengan Kategori B dengan nilai absolut 60-70 memiliki interpretasi Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen. dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

4.2. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas Aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan dan pembinaan relawan.
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BNPB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota dalam Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana prasarana terhadap bencana, Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, serta Pencarian , pertolongan dan Eavkuasi Korban Bencana.
- 4) Meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan mengoptimalkan dokumen kajian risiko bencana dalam pelaksanaan kegiatan.

- 5) Melakukan pendataan kebutuhan standar pelayanan informasi rawan bencana.
- 6) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
- 7) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung respon bencana
- 8) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan papan rambu informasi, peringatan dan larangan bencana yang berstandarisasi
- 9) Memperbaiki tata kelola kegiatan.
- 10) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
- 11) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
- 12) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
- 13) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
- 14) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 23 Januari 2026



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETIANTO NUGROHO AJI, S.H., M.Si.

Jabatan : KEPALA PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
6. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

7. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
8. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
10. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.18.782.992.258	APBD
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.5.475.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.24.257.992.258	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.


SETIANTO NUGROHO AJI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710271994031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	PD	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73
4.	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	18,11
5.	Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	19,55
6.	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100
7.	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2
8.	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	19,25

9.	Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
10.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
11.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
12.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
13.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
14.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
15.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
16.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
17.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
18.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

19.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
20.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
21.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.



SETIANTO NUGROHO AJK, S.H., M.Si.

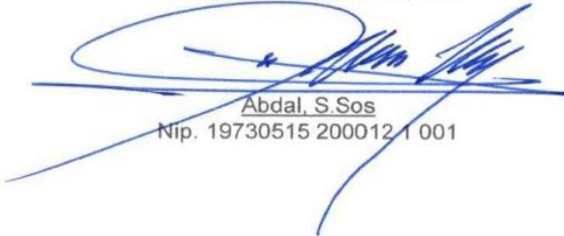
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710271994031008

**DATA KORBAN DAN KERUSAKAN AKIBAT BENCANA
BULAN : JANUARI - DESEMBER 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	KORBAN								KERUSAKAN											Taksiran Kerugian (Rp)		
			Selamat (Jiwa)	Terdampak		Meninggal (Jiwa)	Hilang (jiwa)	Luka/Sakit /Menderita	Mengungsi (jiwa)		Rmh RB (unit)	Rmh RR (unit)	Rmh terendam (unit)	Kantor (unit)	Sekolah (unit)	Tempat ibadah (unit)	Sarana kesehatan (unit)	Bangunan lain (unit)	Jembatan (unit)	Jalan (Km)	Sawah /Kebun (Ha)		Hutan/Lahan (Ha)	
				KK	Jiwa				KK	Jiwa														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Kebakaran Pemukiman	4		21	55																			
2	Kebakaran Hutan & Lahan	3																					41.26	
3	Tanah Longsor	9		16	59																			
4	Puting Beliung																							
5	Banjir	20		2118	3741																			
6	Kecelakaan Trans.Udara																							
7	Kecelakaan Trans.Air	1		1	1	1																		
8	Orang Hilang & Tenggelam	11	7	18	18	11																		
9	Konflik Sosial																							
10	Pohon Tumbang	10		3	3	1																		
11	Kekeringan	8		88	378																			
12	gulma/Napung/Enceng Gondok																							
Jumlah		66	7	2265	4255	13																		41.26

Tenggarong Seberang, 31 Desember 2025

Kabid Kedaruratan & Logistik,


Abdal, S.Sos
Nip. 19730515 200012 1 001

Kasi Kedaruratan,


Syaiful Muhammad, S.Sos
Nip. 19770919 200604 1 017

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA
DALAM WILAYAH KUTAI KARTANEGARA
UNTUK BULAN JANUARI - DESEMBER 2025**

NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA													JUMLAH	KET
		Kebakaran Pemukiman	Kebakaran Lahan	Tanah Longsor	Angin Puting Beliung	Banjir	Kecelakaan Trans. Air	Kecelakaan Trans. Udara	Orang Hilang / Tenggelam	Konflik Sosial	Pohon Tumbang	Kekeringan	gulma/Napung/En ceng Gondok	Lain-Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tenggarong	2		4		3			2		6	6			23	
2	Tenggarong Seberang	2		1		1			2		6				12	
3	Loa Kulu			2		3			3						8	
4	Loa Janan			3		1						2			6	
5	Sanga-Sanga														0	
6	Anggana														0	
7	Muara Badak														0	
8	Marang Kayu					2									2	
9	Samboja														0	
10	Muara Jawa														0	
11	Sebulu								1						1	
12	Muara Kaman		2			3									5	
13	Kota Bangun		1												1	
14	Muara Muntai					1									1	
15	Muara Wis					1									1	
16	Kenohan														0	
17	Kembang Janggut					1									1	
18	Tabang						1								1	
19	Samboja Barat														0	
20	Kota Bangun Darat					3									3	
21	Bongan Kab Kutai Barat								1						1	
JUMLAH		4	3	10	0	19	1	0	8	0	12	8	0	0	66	

Tenggarong Seberang, 31 Desember 2025

Kabid Kedaruratan dan Logistik,

Kasi Kedaruratan,

Abdal, S.Sos

Nip. 19730515 200012 1 001

Syaiful Muhammady, S.Sos

19770919 200604 1 017

**DAFTAR REKAPITULASI DATA BENCANA BULAN JANUARI - DESEMBER 2025
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Jenis Bencana/Kejadian	Banyaknya kejadian	Jumlah Korban				Korban Meninggal	Hutan/Lahan/ Kebun (Ha)
			Kendaraan	Bangunan	Jiwa	KK		
1	Kebakaran Pemukiman	4			55	21		
2	Kebakaran Hutan & Lahan	3					41.26	
3	Tanah Longsor	9			59	16		
4	Puting Beliung							
5	Banjir	20			3,741	2,118		
6	Kecelakaan Trans.Udara							
7	Kecelakaan Trans.Air	1			1	1	1	
8	Orang Hilang & Tenggelam	11			18	18	11	
9	Konflik Sosial							
10	Pohon Tumbang	10			3	3	1	
11	Kekeringan	8			378	88		
12	gulma/Napung/Enceng Gondok	0						
Jumlah		66			4255	2265	13	41.26

Tenggarong Seberang, 31 Desember 2025

Kabid Kedaruratan dan Logistik,

Kasi Kedaruratan,

Abdal, S.Sos

Nip. 19730515 200012 1 001

Syaiful Muhammadiyah, S.Sos

Nip. 19770919/200604 1 017

Mengetahui,
Kepala Pelaksana,
BPBD Kab. Kutai Kartanegara,

Setianto Nugroho Aji, SH, M.Si
NIP. 19671027 199403 1 008



